

Implementasi Kebijakan Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN) pada Proyek Konstruksi Jalan di Kota Denpasar

Dewa Ayu Trisna Adhiswari Wedagama¹, Ida Bagus Gde Agung Yoga Pramana², I
Made Satya Graha³

¹ Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional

² Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pendidikan Nasional

³ Program Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Jember

Email: adhiswariwedagama@undiknas.ac.id, yogapramana@undiknas.ac.id, satyagraha@unej.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Jalan Gunung Mas dan Jalan Gunung Patas, Denpasar Barat, Bali, yang didanai melalui APBD 2023. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi kasus dengan data proyek TKDN hasil wawancara sebagai data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek ini mencapai nilai TKDN sebesar 63,71%, melampaui batas minimum 25% yang ditetapkan pemerintah, sehingga tidak memerlukan evaluasi tambahan atau sanksi finansial. Implementasi TKDN dalam sektor konstruksi jalan terbukti memberikan manfaat bagi industri lokal, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong penciptaan lapangan kerja dan investasi dalam negeri. Namun, masih terdapat tantangan dalam akurasi perhitungan dan ketersediaan data TKDN. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pemantauan, transparansi data, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri guna mengoptimalkan penerapan TKDN dalam proyek konstruksi di Indonesia. Adapun, penelitian ini memiliki implikasi terkait krusialnya pengadaan sistem informasi TKDN yang terbuka dan penguatan industri lokal. Eksplorasi efektivitas TKDN dalam sektor konstruksi lainnya beserta pengembangan metode evaluasi TKDN disarankan sebagai riset lanjutan.

Kata kunci: Tingkat Kandungan Dalam Negeri, TKDN, Konstruksi.

ABSTRACT

This study analyses the implementation of the Domestic Component Level (TKDN) in the construction and rehabilitation of roads in the Gunung Mas and Gunung Patas areas, West Denpasar, Bali, funded by the 2023 Regional Budget (APBD). This study used a descriptive qualitative method, using a case study with TKDN project data from interviews as primary data. The findings indicate that the project achieved a TKDN value of 63,71%, exceeding the government's minimum requirement of 25%, eliminating the need for additional evaluation or financial sanctions. Implementing TKDN in road construction has proven beneficial for local industries, reducing dependence on imports, and encouraging job creation and domestic investment. However, challenges remain in terms of calculation accuracy and data availability. Therefore, improving monitoring systems, enhancing data transparency, and fostering collaboration between the government and industry stakeholders are essential to optimising TKDN implementation in construction projects across Indonesia. The research implications are related to establishing an open TKDN information system and supporting local industries. Exploring the effectiveness of TKDN in other construction sectors, along with developing TKDN evaluation methods, is suggested as further research.

Keywords: Domestic Component Level, TKDN, Construction.

Pendahuluan

Jalan merupakan infrastruktur penting bagi pembangunan nasional, karena memiliki peran signifikan dalam memfasilitasi pergerakan aktivitas orang dan barang. Infrastruktur jalan yang baik harus mampu memberikan dampak positif seperti memperlancar konektivitas, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik dan perbaikan kualitas hidup sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama dalam

agenda pembangunan Indonesia yang merata. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah Indonesia mendorong peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri, khususnya dalam proyek-proyek konstruksi jalan. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, antara lain Keputusan No. 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri [1] [2]

Perhitungan TKDN mengatur batas minimum untuk setiap sektor guna mendorong penggunaan produk dalam negeri pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN, dengan ketentuan yang bervariasi antara sektor-sektor yang ada. Secara umum, batas minimum TKDN untuk sektor konstruksi jalan di Indonesia diatur pada angka minimal 25% untuk semua jenis pekerjaan konstruksi, termasuk yang dibiayai APBD (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara) [3]

Kebijakan TKDN merupakan hal yang krusial dalam peningkatan ekonomi tingkat lokal Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan penggunaan jasa dan produk dalam negeri, TKDN memiliki objektif untuk memperkuat industri lokal dan mengurangi adanya ketergantungan impor. Adanya kebijakan TKDN mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas produk, dan produksi. Selain itu, kebijakan ini menciptakan lapangan kerja dan pemanfaatan bahan baku lokal, yang dapat memperkuat ekonomi lokal [4]. Penerapan TKDN tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek psikologis yang penting, terutama terkait dengan persepsi masyarakat dan konsumen terhadap produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri yang lebih tinggi dapat meningkatkan rasa kebanggaan nasional, yang berperan dalam memperkuat identitas kolektif bangsa. Dalam konteks ini, konsumen yang mendukung produk lokal merasa turut berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi negara dan kesejahteraan sosial. Faktor ini mengarah pada peningkatan loyalitas konsumen terhadap merek-merek lokal, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing industri dalam negeri.

Pemerintah Kota Denpasar juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung industri lokal melalui kebijakan ini, meskipun tidak ada ketentuan TKDN khusus untuk konstruksi jalan di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 mengenai percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta gerakan nasional "Bangga Buatan Indonesia" yang bertujuan untuk menciptakan iklim konsumsi yang mendukung produk lokal. Penyedia jasa di Kota Denpasar diharapkan untuk berpartisipasi dalam gerakan ini dengan meningkatkan komponen dalam negeri dalam proyek-proyek konstruksi yang mereka kerjakan.

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek konstruksi jalan yang dilaksanakan di Kota Denpasar pada tahun 2023. Sebagai studi kasus, proyek yang dipilih untuk dianalisis adalah proyek konstruksi jalan yang melibatkan pembangunan dan perbaikan jalan di kawasan Jalan Gunung Mas dan Jalan Gunung Patas, yang terletak di wilayah Denpasar Barat, Bali. Proyek ini dipilih karena representatif dalam menggambarkan penerapan kebijakan TKDN di tingkat daerah, khususnya dalam sektor infrastruktur jalan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan TKDN dapat mempengaruhi penggunaan produk dan jasa dalam negeri dalam proyek konstruksi, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal dan penguatan industri domestik, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang turut berperan dalam keberhasilan implementasinya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian menggunakan metode kualitatif dan deskriptif melalui studi kasus untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya dengan proses wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi literatur serta kepustakaan dari instansi terkait atau sumber – sumber yang relevan. Data wawancara yang telah didapat akan dianalisis melalui metode analisis konten sebagai upaya interpretasi narasi terkait implementasi kebijakan TKDN di proyek konstruksi jalan di Denpasar, dan juga untuk membandingkan persepsi dari pihak-pihak yang terlibat

Kemudian, dilakukan analisis implementasi kebijakan menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan fokus pemain di tingkat lokal [5], dalam studi ini yaitu kontraktor dan konsultan, beserta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar. Pendekatan ini dipilih sebagai proses pemahaman proses penafsiran, adaptasi dan implementasi TKDN oleh pihak yang terlibat di lapangan.

Dari hasil Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 terdapat perhitungan TKDN memiliki ketentuan minimum yang ditetapkan untuk setiap sketornya untuk penggunaan yang bersumber dari APBN sebagai berikut:

1. TKDN Sumber Daya Air: minimum 25 – 80%
2. TKDN Bina Marga: minimum 65 – 70%
3. TKDN Cipta Karya: 30 – 85%
4. TKDN Perumahan: rumah susun 45% dan rumah khusus 55%
5. Jasa konsultasi: minimum 60%

Untuk perhitungan persentase TKDN yang digunakan untuk menentukan persentase komponen produk atau jasa yang berasal dari dalam negeri dalam suatu proyek atau barang digunakan rumus berikut:

$$\% \text{TKDN} = \frac{\text{Biaya KDN}}{\text{Biaya total}} \times 100\%$$

1. Biaya KDN (Komponen Dalam Negeri):

- o Ini adalah total biaya yang digunakan untuk membeli atau menggunakan barang, material, atau jasa yang diproduksi di dalam negeri (Indonesia).
- o Contoh: Jika dalam proyek konstruksi, Anda menggunakan bahan bangunan yang diproduksi di Indonesia, maka biaya untuk membeli bahan tersebut dihitung sebagai Biaya KDN.

2. Biaya Total:

- o Ini adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk proyek atau produk tersebut, yang mencakup baik komponen dalam negeri maupun komponen luar negeri.
- o Contoh: Dalam proyek konstruksi, biaya total adalah jumlah biaya yang meliputi biaya material lokal dan impor, biaya tenaga kerja, serta biaya jasa yang digunakan.

Keterangan:

- o TKDN dihitung dengan membandingkan seberapa besar Biaya KDN (komponen dalam negeri) terhadap Biaya Total.
- o Hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan nilai persentase. Nilai TKDN yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar komponen dalam proyek atau produk tersebut berasal dari dalam negeri.

Pada penelitian ini dipilih tiga orang sebagai narasumber yang berasal dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagai pemilik pekerjaan proyek konstruksi, serta dua orang narasumber lainnya dari pihak konsultan dan kontraktor. Pemilihan narasumber didasarkan untuk mendapat pandangan yang holistik dari seluruh jajaran utama dengan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan TKDN khususnya proyek konstruksi jalan. Dinas PUPR Kota Denpasar mewakili perspektif pemerintah yang menjadi pemilik dan regulator, serta memiliki tanggung jawab atas pengawasan beserta kebijakan terkait. Pihak konsultan dan kontraktor mewakili perspektif lapangan yang mengalami tantangan operasional, proses implementasi dan juga ketersediaan material. Pengambilan ketiga sudut pandang ini memungkinkan hasil analisis yang holistik terkait penerapan kebijakan TKDN dari berbagai level pelaksana.

Pertanyaan wawancara dilakukan untuk meninjau lebih jauh terkait implementasi kebijakan TKDN pada proyek konstruksi jalan di kota Denpasar. Pertama, dilakukan wawancara dengan inti sejauh mana pemahaman narasumber tentang kebijakan TKDN dan bagaimana interpretasi dan implementasi kebijakan tersebut dalam proyek terkait. Kemudian, dilakukan juga wawancara terkait tantangan teknis yang sering muncul dalam upaya pemenuhan standar TKDN (keterbatasan material lokal dan kesesuaian spesifikasi teknis). Pertanyaan lain meliputi standar persyaratan TKDN dalam membatasi pembuatan kontrak proyek dan konsekuensi dari pembatasan tersebut. Tinjauan terkait komunikasi antar level penyelenggara proyek juga dilakukan untuk melihat seberapa baik komunikasi yang ada. Terakhir, dilakukan wawancara dengan topik penentuan dimensi yang paling efektif dalam pelaksanaan proyek, beserta dimensi yang menjadi kendala utama berdasarkan kondisi faktual lapangan.

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 1 merupakan rekapitulasi estimasi biaya untuk berbagai divisi dalam proyek konstruksi. Setiap divisi memiliki rincian item pekerjaan, jumlah satuan, harga satuan, serta total biaya yang dihitung berdasarkan kuantitas dan harga per satuan. Selain itu, tabel juga mencantumkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam persentase dan nilai rupiah.

Tabel 1. Rincian Biaya dan TKDN Pekerjaan Konstruksi Gunung Mas dan Gunung Patas

No. Mata	Uraian	Satuan	Perkiraan	Harga	Jumlah	TKDN	NILAI TKDN
Pembayaran			Kuantitas	Satuan	Harga-Harga	%	(Rp)
				(Rupiah)	(Rupiah)		
a	b	c	d	e	f = (d x e)		
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi						
1.2	Mobilisasi	LS	1,0	10.455.000	10.455.000,00	100,00	10.455.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				10.455.000,00	100,00	10.455.000,00
	DIVISI SPESIFIKASI KHUSUS SKh-1.1.22 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) UNTUK PEKERJAAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN						
SKh-1.1.22.1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK:						
SKh-1.1.22.1.(1)	Pembuatan Dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK						
SKh-1.1.22.1.(2)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00	650.000,00	650.000,00	100,00	650.000,00
SKh-1.1.22.1.(3)	Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK						
SKh-1.1.22.2	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan:						
SKh-1.1.22.2.(8)	Spanduk (<i>Banner</i>) Uk 1x2 m	Lbr	1,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
SKh-1.1.22.2.(9)	Poster / <i>Leaflet</i> Uk 1x2 m	Lbr	1,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
SKh-1.1.22.2.(10)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Buah	1,00	962.800,00	962.800,00	100,00	962.800,00
SKh-1.1.22.3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:						
SKh-1.1.22.3.(2)	APD, antara lain:						
SKh-1.1.22.3.(2).a	Topi Pelindung (<i>Safety Helmet</i>)	Buah	30,00	55.000,00	1.650.000,00	71,12	1.173.480,00
SKh-1.1.22.3.(2).f	Pelindung Pernafasan dan Mulut (<i>Masker, Masker Respirator</i>)	Box	20,00	45.000,00	900.000,00	46,63	419.670,00
SKh-1.1.22.3.(2).g	Sarung Tangan (<i>Safety Gloves</i>)	Psg	25,00	40.000,00	1.000.000,00	79,53	795.300,00
SKh-1.1.22.3.(2).h	Sepatu Keselamatan (<i>Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap</i>)	Psg	30,00	195.000,00	5.850.000,00	31,09	1.818.765,00
SKh-1.1.22.3.(2).k	Rompi Keselamatan (<i>Safety Vest</i>)	Buah	30,00	58.000,00	1.740.000,00	57,91	1.007.634,00
SKh-1.1.22.4	Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi:						
SKh-1.1.22.5	Personel Keselamatan Konstruksi:						
SKh-1.1.22.5.(3)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	OB	4,00	3.444.000,00	13.776.000,00	100,00	13.776.000,00
SKh-1.1.22.5.(8)	Petugas Pengatur Lalu Lintas	OB	8,00	2.999.646,14	23.997.169,12	100,00	23.997.169,12

SKh-1.1.22.6	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan:						
SKh-1.1.22.7	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas:						
SKh-1.1.22.7.(1)	Rambu Petunjuk	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
SKh-1.1.22.7.(2)	Rambu Larangan	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
SKh-1.1.22.7.(3)	Rambu Peringatan	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
SKh-1.1.22.7.(4)	Rambu Kewajiban	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
SKh-1.1.22.7.(5)	Rambu Informasi	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
SKh-1.1.22.7.(8)	Kerucut Lalu Lintas (<i>Traffic Cone</i>)	Buah	10,00	125.000,00	1.250.000,00	33,59	419.875,00
SKh-1.1.22.8	Konsultasi Dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi:						
SKh-1.1.22.9	Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:						
SKh-1.1.22.9.(4)	Bendera K3	Buah	1,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00
SKh-1.1.22.9.(5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	20,00	50.684,00	1.013.680,00	100,00	1.013.680,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI SPESIFIKASI KHUSUS SKh-1.1.22 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				54.454.649,12	87,59	47.699.373,12
	DIVISI 2. DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	81,60	30.556,21	2.493.386,74	77,69	1.937.136,12
	Saluran Berbentuk U Type 400x400x1200 pree cast	M1	985,00	483.748,71	476.492.479,35	72,66	346.215.966,70
	Plat Penutup Tipe 600 x 1200 pree cast	M1	280,00	578.409,35	161.954.618,00	72,43	117.309.300,23
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				640.940.484,09	72,62	465.462.403,05
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	474,00	54.552,70	25.857.979,80	75,35	19.483.899,80
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.835,00	8.407,09	15.427.010,15	75,19	11.598.831,02
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				41.284.989,95	75,29	31.082.730,82
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	684,50	352.460,02	241.258.883,69	97,37	234.921.599,05
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M3	243,50	1.148.266,89	279.602.987,72	87,05	243.402.385,14

	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				520.861.871,4 1	91,83	478.323.984,19
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi / Aspal Cair	Liter	1.170,00	22.819,69	26.699.037,30	34,34	9.168.449,41
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi / Aspal Cair	Liter	3.715,15	23.780,44	88.347.901,67	35,25	31.143.757,81
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	816,68	1.346.650,5 8	1.099.782.595 ,67	68,55	753.903.129,13
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.265,13	1.270.917,9 2	1.607.876.388 ,13	46,81	752.646.937,28
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				2.822.705.922 ,77	54,80	1.546.862.273, 63
	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa K-250	M3	0,75	1.391.155,9 1	1.043.366,93	88,40	922.350,37
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa K-175	M3	1,50	1.233.021,0 1	1.849.531,52	89,09	1.647.743,17
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	131,25	16.417,02	2.154.733,88	58,47	1.259.956,56
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	120,00	867.740,18	104.128.821,6 0	94,45	98.352.390,24
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	18,00	364.662,86	6.563.931,48	87,98	5.774.840,25
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	30,00	326.177,69	9.785.330,70	87,16	8.528.629,16
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				125.525.716,1 0	92,80	116.485.909,75
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	597,69	222.506,68	132.990.017,5 7	51,80	68.888.829,10
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				132.990.017,5 7	51,80	68.888.829,10
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	46,81	3.116.563,2 1	145.886.323,8 6	67,66	98.702.154,59
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				145.886.323,8 6	67,66	98.702.154,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Tabel 1 memberikan gambaran lengkap mengenai estimasi biaya konstruksi berdasarkan berbagai divisi pekerjaan. Setiap divisi memiliki kontribusi biaya yang berbeda-beda, dengan tingkat TKDN yang menunjukkan seberapa besar pemanfaatan produk dan tenaga kerja dalam negeri dalam proyek ini.

Pekerjaan mobilisasi yang di dalamnya tergabung SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) memiliki nilai TKDN tertinggi. Hal ini dapat terlihat pada nilai TKDN 100% pada pekerjaan mobilisasi. Untuk divisi SMKK memiliki nilai TKDN 100% dalam beberapa bagian seperti pembuatan dokumen, spanduk dan banner, serta petugas keselamatan konstruksi, serta beberapa rambu dan bendera K3. Dilihat dari segi bahan material menggunakan bahan yang berasal dari alam (material langsung) seperti kayu lokal yang memiliki nilai TKDN sebesar 100%. Tenaga kerja yang digunakan pada proyek ini juga berasal dari WNI, dimana memiliki nilai TKDN sebesar 100%. Sedangkan pekerjaan yang memiliki nilai TKDN terendah yaitu pekerjaan Divisi Perkerasan Aspal (Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi / Aspal Cair, Lapis Perekat - Aspal Emulsi / Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Marka Jalan Termoplastik. Hasil TKDN pada pekerjaan ini rendah dikarenakan biasanya bahan baku aspal yang umumnya merupakan bahan impor serta teknologi produksi yang sering kali berasal dari luar negeri.

Perhitungan nilai akhir TKDN untuk pekerjaan proyek konstruksi Jalan Gunung Mas dan Jalan Gunung Patas:

$$\begin{aligned}\% \text{TKDN} &= \frac{\text{Biaya KDN}}{\text{Biaya total}} \times 100\% \\ &= \frac{2.863.962.658}{4.495.104.974,86} \times 100\% \\ &= 63,71\%\end{aligned}$$

Untuk pekerjaan jalan Gunung mas dan gn patas mendapatkan nilai TKDN sebesar 63,71%. Hal ini sudah memenuhi batas ketentuan nilai minimum TKDN oleh pemerintah yaitu sebesar 25% dan tidak dilakukan tahap evaluasi dan dikenakan sanksi finansial.

Implementasi Kebijakan TKDN pada Proyek Konstruksi Jalan Di Denpasar

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih penting dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Dari pengertian tersebut, dilakukan wawancara terhadap narasumber di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar selaku pemilik pekerjaan serta para kontraktor dan konsultan terhadap implementasi dari kebijakan TKDN khususnya pada bidang konstruksi jalan raya. Regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2001 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berbagai Peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur sertifikasi TKDN. Dalam sejumlah proyek strategis nasional, pemerintah menetapkan kewajiban pencapaian TKDN minimal 40–50% guna memaksimalkan dampak positif terhadap pengembangan industri dalam negeri. Implementasi kebijakan TKDN ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengadaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sejalan dengan prinsip-prinsip yang relevan.

Batas minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pekerjaan konstruksi jalan di Kota Denpasar mengikuti ketentuan nasional, yaitu sebesar minimal 25% untuk seluruh jenis pekerjaan konstruksi, termasuk yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah Kota Denpasar secara aktif mendorong optimalisasi TKDN dalam berbagai kegiatan pengadaan barang dan jasa yang didanai oleh APBD, guna mendukung pertumbuhan industri lokal serta meningkatkan daya saing sektor konstruksi di daerah tersebut. Pada studi lain yang dilakukan pada proyek konstruksi gedung di Surabaya, total besaran TKDN yang didapatkan adalah 73,38% dengan nilai BMP sebesar 8,43%. Hal ini menjadi penguat bahwa capaian TKDN pada proyek lain memiliki kapabilitas untuk memenuhi standar minimum 40% yang telah ditetapkan oleh pemerintah [6]

Tantangan Utama dan Strategi Kebijakan TKDN

Pemenuhan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek jalan menghadapi berbagai tantangan, baik dari perspektif pemilik proyek di instansi PUPR maupun dari sisi konsultan dan kontraktor pelaksana. Dari sisi Dinas PUPR Kota Denpasar sebagai penyedia sekaligus

pemilik pekerjaan konstruksi, tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan pasokan material lokal yang memenuhi spesifikasi teknis, variasi kualitas produk dalam negeri, serta kompleksitas proses sertifikasi TKDN yang memerlukan koordinasi yang mendalam dengan penyedia jasa. Selain itu, sinergi yang erat antara instansi terkait, seperti Inspektorat dan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini. Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah efisiensi anggaran, mengingat bahwa beberapa produk lokal sering kali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk impor, yang dapat berdampak pada optimalisasi penggunaan dana dalam proyek.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam perumusan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) adalah ketidakterediaan atau keterbatasan data nilai TKDN pada situs web resmi Kementerian Perindustrian. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian dalam perhitungan nilai TKDN, sehingga akurasi perhitungan tidak dapat dipastikan secara optimal. Akibatnya, proses validasi dan pengambilan keputusan terkait penggunaan produk dalam negeri dalam suatu proyek menjadi lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di antara pemangku kepentingan.

Sementara itu, dari sudut pandang konsultan dan kontraktor pelaksana, tantangan utama mencakup keterbatasan alternatif bahan konstruksi bersertifikat TKDN, proses verifikasi yang memakan waktu, serta kendala dalam menyeimbangkan antara spesifikasi teknis, biaya, dan ketersediaan produk lokal. Kesulitan lain yang dihadapi adalah potensi keterlambatan proyek akibat terbatasnya rantai pasok bahan lokal yang memenuhi syarat serta ketidaksesuaian beberapa produk dalam negeri dengan standar mutu yang dipersyaratkan (Yulianti, 2023). Hasil studi lain yang dilakukan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada proyek peningkatan jalan menunjukkan hasil yang relevan. Pada proyek ini, terdapat kendala terkait penggunaan aspal dikarenakan kebutuhan penggunaan material yang spesifik tidak sebanding dengan ketersediaan pasokan di daerah terkait. Meskipun kendala tersebut, tercapai keberhasilan tingkat penggunaan material konstruksi lokal. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi dalam keberhasilan TKDN proyek ini seperti optimalisasi pasokan aspal, pelatihan tenaga kerja, dan juga adanya keterlibatan dari penyedia lokal [7].

Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, maka dapat dilakukan hal – hal seperti memperkuat kemitraan dengan industri lokal sehingga kualitas dan ketersediaan material yang sesuai dengan standar teknis proyek dapat meningkat. Proses sertifikasi TKDN yang kompleks perlu difasilitasi dengan menyediakan panduan yang jelas dan pelatihan kepada penyedia barang/jasa serta pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait untuk memperlancar implementasi kebijakan TKDN. Untuk mengatasi perbedaan harga antara produk lokal dan impor, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan subsidi atau insentif bagi penggunaan produk lokal, guna menjaga efisiensi anggaran proyek.

Di pihak konsultan serta kontraktor pelaksana perlu mengembangkan strategi diversifikasi sumber material lokal dengan bekerja sama dengan berbagai pemasok bahan lokal yang memenuhi standar TKDN, serta melakukan riset pasar untuk menemukan alternatif bahan yang berkualitas dan sesuai harga. Pengelolaan rantai pasok yang efisien juga sangat penting untuk menghindari keterlambatan dalam pasokan bahan yang disertifikasi TKDN, dengan merencanakan pengadaan material lebih awal dan menjaga komunikasi yang baik dengan pemasok. Peningkatan pengetahuan tentang TKDN melalui pelatihan dan seminar akan mempermudah proses verifikasi dan sertifikasi material. Pemanfaatan teknologi untuk monitoring dan pelaporan penggunaan material juga dapat mempercepat verifikasi dan meningkatkan transparansi. Dengan strategi-strategi ini, tantangan yang ada dapat diatasi secara efektif, menghasilkan proyek yang berkualitas, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan industri dalam negeri.

Tabel 2. Tantangan dan Strategi Implementasi TKDN

Sudut Pandang	Tantangan Utama	Strategi Implementasi
Dinas PUPR (Pemerintah)	Terbatasnya variasi dan kualitas stok material lokal	Meningkatkan kemitraan dengan industri lokal
	Kurangnya sinergi antar instansi	Meningkatkan koordinasi antar instansi
	Harga produk lokal yang lebih tinggi karena efisiensi anggaran	Mempertimbangkan insentif produk lokal
	Terbatasnya data terkait nilai TKDN resmi	Memperbaiki ketersediaan data yang transparan dan mudah diakses
Konsultan & Kontraktor (Pelaku Usaha)	Kurangnya alternatif bahan yang bersertifikat TKDN	Diversifikasi sumber melalui riset pasar lokal material
	Proses verifikasi yang lambat yang menyebabkan potensi keterlambatan proyek	Efisiensi rantai pasok

Ketidaksesuaian standar mutu Riset pasar material yang berkualitas
dengan produk lokal

Dampak Positif Kebijakan TKDN pada Proyek Konstruksi

Penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam bidang barang, jasa, dan konstruksi memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perekonomian nasional serta industri terkait. Dalam sektor pengadaan barang, TKDN mendorong penggunaan produk dalam negeri, sehingga memperkuat daya saing industri lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dengan meningkatnya permintaan terhadap barang produksi dalam negeri, industri manufaktur dapat berkembang lebih pesat, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi produk.

Dalam sektor jasa, TKDN berperan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam negeri dengan mendorong penggunaan tenaga ahli lokal dalam berbagai proyek strategis. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Selain itu, penerapan TKDN dalam bidang jasa mendorong pertumbuhan industri jasa pendukung, seperti konsultasi teknik, perawatan, dan penyediaan layanan berbasis teknologi yang berbasis di dalam negeri.

Pada bidang konstruksi, kebijakan TKDN berkontribusi dalam penguatan sektor infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan penggunaan material dan tenaga kerja dalam negeri. Dengan adanya ketentuan ini, proyek-proyek konstruksi, baik yang berskala kecil maupun besar, didorong untuk menggunakan bahan baku lokal, seperti semen, baja, dan aspal, yang memiliki standar kualitas sesuai regulasi nasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya proyek tetapi juga mempercepat pertumbuhan industri bahan bangunan dalam negeri. Selain itu, penggunaan tenaga kerja lokal dalam proyek konstruksi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Zakaria et al., 2023).

Secara keseluruhan, penerapan TKDN dalam sektor barang, jasa, dan konstruksi memberikan dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan daya saing industri dalam negeri. Dengan kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat, TKDN dapat menjadi instrumen strategis dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan.

Penerapan kebijakan TKDN tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan industri, tetapi juga memiliki pengaruh psikologis terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat umum. Kebijakan ini dapat memunculkan berbagai reaksi emosional, mulai dari motivasi dan optimisme hingga tantangan adaptasi terhadap regulasi baru.

Bagi pelaku industri dalam negeri, kebijakan TKDN dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi untuk bersaing di pasar nasional maupun global. Dengan adanya dukungan kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam berbagai proyek, pelaku usaha merasa dihargai dan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Rasa optimisme ini mendorong inovasi, kreativitas, dan semangat untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi perusahaan yang belum siap untuk memenuhi standar TKDN. Tantangan dalam meningkatkan kandungan lokal dalam produksi dapat menyebabkan stres dan kekhawatiran, terutama bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku atau teknologi impor. Pelaku usaha mungkin merasa terbebani dengan persyaratan administratif dan sertifikasi TKDN yang harus dipenuhi, yang dapat meningkatkan kecemasan terhadap kelangsungan bisnis mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan TKDN memiliki dampak psikologis yang kompleks. Sementara bagi sebagian besar pihak kebijakan ini dapat meningkatkan optimisme, motivasi, dan rasa percaya diri, bagi yang belum siap, kebijakan ini juga dapat memunculkan tekanan dan kecemasan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan agar kebijakan TKDN dapat diimplementasikan secara efektif tanpa menimbulkan dampak psikologis yang merugikan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek konstruksi jalan di Kota Denpasar, khususnya di Jalan Gunung Mas dan Jalan Gunung Patas, telah memenuhi ketentuan nilai minimum TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 25%, dengan pencapaian 63,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa proyek konstruksi jalan di tingkat daerah telah berkontribusi dalam mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri. Penerapan TKDN terbukti memiliki dampak positif terhadap industri lokal, mengurangi ketergantungan

pada impor, serta menciptakan peluang kerja dan investasi baru. Namun, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi implementasi TKDN, terutama terkait ketersediaan data dan perhitungan nilai TKDN yang lebih akurat.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi TKDN dalam proyek konstruksi, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi, serta menyediakan akses yang lebih transparan terhadap data TKDN guna menghindari ketidakpastian dalam perhitungannya. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas industri lokal agar dapat lebih kompetitif dalam memenuhi persyaratan TKDN. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi juga menjadi penting dalam mendukung riset serta inovasi yang berkelanjutan guna memperkuat industri dalam negeri di sektor konstruksi. Terdapat kebutuhan yang disarankan menjadi prioritas utama untuk riset lebih lanjut terkait sektor konstruksi lain, dibutuhkan juga pengembangan kebijakan dalam pemetaan rantai pasok lokal sebagai upaya untuk identifikasi potensi lokal yang sub-optimal untuk perumusan strategi peningkatan TKDN yang lebih tepat sasaran dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- [1] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan," Jakarta, 2021.
- [2] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri," Jakarta, 2011.
- [3] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara," Jakarta, 2018.
- [4] J. D. Irawan, "Pengaruh Regulasi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Asing," *Jurnal Ilmiah Global Education*, vol. 5, no. 4, pp. 2508-2520, 2024.
- [5] F. Sager, C. Mavrot and L. Keiser, "Top-Down and Bottom-Up Implementation," in *Handbook of Public Policy Implementation*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2024, p. 542.
- [6] N. T. Octavia, "Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Proyek Konstruksi Gedung (Studi Kasus: Proyek Gedung Tower 2 ITS Surabaya)," Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, 2024.
- [7] Medianto, "Analisis Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Peningkatan Jalan (HOTMIX) Desa Arga Jaya (Jalan Mawar, Melati, Matahari) Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.," Universitas Andalas, Padang, 2024.
- [8] E. Yulianti, "Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Perguruan Tinggi," *Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos.*, vol. 10, no. 3, pp. 1448-1455, 2023.
- [9] T. Hidayat, R. Putera and H. Koeswara, "Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan," *J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 12, no. 1, pp. 85-94, 2024.
- [10] A. Zakaria, F. Firdaus, K. Arifin, M. Munawar and A. Gunawan, "Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) terhadap Daya Saing Produk," *J. Ekobis Dewantara*, vol. 6, no. 1, pp. 318-323, 2023.